

Koran Mimbar Umum

Tepercaya & Aktual

EDITION SEJAK 6 NOVEMBER 1945

Edisi Digital tersedia di
myedisi



SELASA, 20 JANUARI 2026

1 SYA'BAN 1447 H

Harga Eceran

Rp. 4000,- (Dalam Kota)

Luar Kota + Ongkos Kirim

Berlangganan Hub. (061) - 7330737

Terbit 12 Halaman | Tahun LXXX No.44

KPK OTT Wali Kota Madiun

Jakarta, MIMBAR – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur (Jatim), hari ini. Salah satu yang diamankan dalam operasi senyap tersebut yakni, Wali Kota Madiun, Maidi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ada 15 orang yang berhasil dia-



■ Bersambung ke Hal 11

MK Kabulkan Uji Materi UU Pers

Pertegas Perlindungan Wartawan

Jakarta, MIMBAR – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XX-III/2025, MK menegaskan perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekali-gus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. "Mengabulkan permohonan untuk Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo, yang disiarkan melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Senin (19/1).

■ Bersambung ke Hal 11

Hakim Tolak Eksepsi Kasus Korupsi Dua Bos Sritex

Jakarta, MIMBAR – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menolak eksepsi yang disampaikan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas

■ Bersambung ke Hal 11



Hidayah

Isra Mikraj Sebagai Hakekat Komunikasi

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Di tengah dunia yang dipenuhi notifikasi, pesan instan, dan linimasa yang tak pernah tidur, manusia justru menghadapi paradoks komunikasi. Informasi melimpah, tetapi makna sering kali menipis. Kita berbicara lebih sering, namun jarang benar-benar mendengar. Dalam konteks inilah peristiwa Isra Mikraj menemukan relevansi kontemporer: ia bukan sekadar mujizat perjalanan Nabi Muhammad melainkan sebuah peristiwa komunikasi transendental yang mengajarkan kembali



■ Bersambung ke Hal 11

Noel Ebenezer Cs Didakwa Lakukan Pemerasan Rp6,5 M

Jakarta, MIMBAR – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024-2029 Immanuel Ebenezer Gerungan dan beberapa orang lainnya didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nilai total Rp6,5 miliar.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 antara lain Fanny Fania Octapiani,

■ Bersambung ke Hal 11

Polemik Pilkada Lewat DPRD DPR-Pemerintah Sepakat Tak Bahas Tahun Ini

DPR dan pemerintah sepakat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD tak akan dibahas dalam masa sidang 2026 tahun ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi UU Pilkada tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diusulkan Komisi II DPR. Sehingga, wacana usul pilkada lewat DPRD tak akan dibahas dalam waktu dekat.

"Kami tadi sudah berbincang-bincang dari DPR dan pemerintah untuk sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak ada pembahasan UU Pilkada," ujar Dasco dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Dasco mengatakan sejauh ini DPR melalui Komisi II hanya akan fokus pada pembahasan RUU Pemilu. Dia bilang pembahasan RUU tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rekrayasa konstitusional ambang batas pencalonan presiden.

Namun, dia memastikan RUU Pemilu tetap akan mengatur mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Dia menepis isu wacana pilpres melalui MPR yang mencuat bersamaan

dengan pilkada lewat DPRD.

"Tapi kami sepakat UU Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ," kata Dasco.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghormati wacana atau usul pilkada lewat DPRD. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Pras, pemerintah akan tetap mendahulukan kepentingan

■ Bersambung ke Hal 11



■ Bersambung ke Hal 11



- Cocok...
- He..he..he..

DPR Batal Bahas RUU Pemilu Omnibus

Jakarta, MIMBAR – Komisi II DPR RI memutuskan untuk membatalkan rencana pembahasan RUU Pemilu menggunakan metode omnibus law atau kodifikasi bersama sejumlah RUU lain.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsyuda usai memastikan bahwa RUU Pilkada tak masuk daftar agenda legislasi prioritas 2026. Dia menegaskan pihaknya pada 2026 hanya akan fokus pada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita fokus hanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senin (19/1).

Dia mengaku hanya mengikuti putusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang telah memutuskan daftar Prolegnas Prioritas 2026. Berdasarkan hasil revisi terakhir pada November 2025, pembahasan RUU Pemilu akan dibahas di Komisi II.

Namun, meski menegaskan Komisi II untuk membahas RUU Pemilu, Rifqi menyebut RUU Pilkada tak termasuk di dalamnya. Dia karena itu menegaskan bahwa wacana

■ Bersambung ke Hal 11

Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung di Kasus Petral

Jakarta, MIMBAR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Senin (19/1) hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengatakan Sudirman diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petal).

"Sudah (datang) lagi diperiksa," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

■ Bersambung ke Hal 11